

Analisis Implementasi Tanggap Darurat Bencana Untuk Menunjang Business Continuity Perusahaan Manufaktur

Zahrani Nabilah¹, Nabila Inne Azri², M.Syaufi Syukri Handoyo³, Abdurozzaq Hasibuan⁴

^{1,2,3} Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Sumatera Utara

⁴Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email : zahraniabilah@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggap darurat bencana untuk mendukung kelangsungan bisnis perusahaan manufaktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif, antara lain wawancara mendalam terhadap tiga informan utama dan dua informan triangulasi. Perkembangan industri sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang didukung oleh segala bentuk teknologi informasi. Tanggap darurat merupakan bentuk upaya manajemen dalam melindungi kegiatan produksi di perusahaan dan menghindari risiko kecelakaan; ia berbagi tujuan ini dengan prinsip kelangsungan bisnis. Perusahaan tidak menyediakan komunikasi aktif; sebaliknya, informasi dibagikan hanya jika diperlukan. Unit-unit perusahaan manufaktur belum mempunyai struktur tanggap darurat yang merata meskipun organisasi sudah melaksanakan P2K3 dan tanggap darurat.

Kata Kunci: Tanggap Darurat, Kelangsungan Usaha, Manufaktur

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 berkembang sangat pesat, kemajuan teknologi menyebabkan berkurangnya sumber daya manusia di sektor manufaktur. Banyaknya situasi kecelakaan kerja yang terjadi di mesin perusahaan, termasuk mesin industri yang melebihi kapasitas penggunaannya, kegagalan kontrol mesin dan banyak kecelakaan kerja yang disebabkan oleh mesin. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan bantuan manusia untuk mengawasi mesin. Operasi dan kontrol, pengembangan mesin untuk kelangsungan hidup. Hal ini merupakan upaya untuk menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan, yang diwujudkan dalam bentuk kesiapsiagaan darurat jika terjadi bencana.

Keterampilan pekerja yang kurang memadai, kurangnya alat pelindung kerja, dan kesalahan yang dilakukan saat menggunakan peralatan kerja semuanya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kerja ini mempunyai bahaya yang cukup besar, antara lain potensi kerugian finansial, kerugian staf, dan terciptanya lingkungan kerja yang tidak nyaman dan berbahaya.

Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan hidup bahwa sistem tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat harus dibentuk oleh setiap perusahaan yang mempunyai risiko kebakaran yang tinggi.

Membuat dan menerapkan manajemen kesinambungan bisnis (BCM) melibatkan perencanaan kesinambungan bisnis, yang juga dikenal sebagai manajemen kesinambungan bisnis. Tindakan membuat dan mencatat berbagai rencana dan protokol bagi perusahaan untuk beradaptasi terhadap kejadian tak terduga saat bencana masih terjadi dikenal sebagai kelangsungan bisnis (DRII, 2008: p) Membuat strategi pemulihan operasional bisnis yang kritis jika terjadi bencana adalah salah satu cara untuk mewujudkan ide tersebut.

Mengingat konteks ini, para peneliti bersemangat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis bagaimana tanggap darurat bencana dilaksanakan, mulai dari pelatihan, implementasi dan penegakan kebijakan, komunikasi, infrastruktur penyelamat jiwa, struktur organisasi, dan kelangsungan bisnis perusahaan manufaktur.

METODE

Desain ini menggunakan purposive sampling yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi observasional deskriptif. Ada dua kategori informan penelitian yaitu triangulasi dan informan inti. Tiga pekerja—ahli K3, staf pekerja, dan keamanan perusahaan menangkap informan utama. Sementara itu, dua eksekutif dari unit korporasi dan grup perusahaan direkrut sebagai informan untuk triangulasi.

Karena kurangnya batasan penelitian, metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam yang berani (juga dikenal sebagai wawancara mendalam) atau wawancara internet. Selain itu, karena keterbatasan penelitian, kajian awal dan observasi dikirimkan melalui Google Form kepada tim P2K3 dari salah satu unit perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelatihan Tanggap Darurat Perusahaan

Para pekerja menerima pelatihan tanggap darurat untuk menginformasikan dan mendidik mereka mengenai risiko yang terkait dengan perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa segala persiapan tanggap darurat bencana harus dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelatihan yang diperlukan.

Menurut penelitian ini, pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru dan karyawan saat ini akan meningkatkan status mereka di tempat kerja. Pihak korporasi biasanya memberikan pelatihan tanggap darurat kebakaran, dengan instruktur yang telah menjalani persiapan dari dalam organisasi. Selain itu, organisasi ini juga menawarkan lokakarya mengenai tanggap darurat dan penjangkauan internal untuk membantu karyawan lebih memahami risiko yang ada di tempat kerja.

Perencanaan pelatihan tanggap darurat sudah tertanam dalam budaya perusahaan. Kesadaran karyawan tumbuh, pekerja menerima pendidikan dan pelatihan, dan protokol tanggap darurat praktis untuk dijalankan berkat adanya pelatihan tanggap darurat yang tegas. Perencanaan mengintegrasikan manajemen keadaan darurat ke dalam tanggung jawab sehari-hari anggota staf dan melibatkan semua tingkat organisasi, termasuk tingkat manajemen, departemen, dan pekerja.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pengurus yang membidangi pelatihan jarang sekali hadir dalam sesi. Meskipun karyawan sadar bahwa pelatihan tersebut diperlukan, banyak yang tidak siap menanganinya dalam keadaan darurat. Hal ini dapat terjadi karena pelatihan pekerja yang memberikan keterampilan yang tidak memadai.

Salah satu cara untuk menilai kemampuan program prosedural adalah melalui pelatihan. Hal ini memungkinkan orang dan organisasi untuk terlibat dan berbagi prosedur dalam lingkungan yang diatur, sehingga memungkinkan karyawan untuk mengenali dan mendukung kelangsungan program.

B. Evaluasi Kebijakan Tanggap Darurat dan Penerapannya

Kebijakan penerapan di perusahaan menjadi acuan bagi rencana pelaksanaan dalam keadaan darurat. Analisis kerentanan, perencanaan audit untuk operasi bisnis, pelatihan staf, dan jadwal evaluasi adalah beberapa aturan yang diterapkan.

Berdasarkan penelitian, kebijakan dan praktik perusahaan telah sesuai dengan standar industri, dibuktikan dengan pemasangan poster keselamatan di area produksi, perolehan sertifikasi ISO yang dipajang di ruang tunggu tamu, kebijakan perusahaan yang melarang penggunaan benda tajam dan korek api di area perusahaan, kebijakan perusahaan yang dipasang di area produksi dan pertemuan, serta adanya petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan badan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja keduanya memperjelas hal tersebut.

Para eksekutif perusahaan harus berdedikasi pada inisiatif yang menghindari, mengurangi dampak, mempersiapkan, bereaksi, dan menjaga operasi tetap berjalan dalam keadaan darurat sampai masalah tersebut teratasi. Untuk menjamin bahwa catatan dapat diakses oleh karyawan setelah suatu kejadian, pemimpin juga harus mampu membuat, menerapkan, dan mengawasi program manajemen dan menyimpan catatan yang akurat. menerapkan proses untuk pemulihan, pengambilan, dan pengarsipan catatan di luar lokasi atau di tempat selain metode peninjauan catatan.

C. Analisis Interaksi Perusahaan Mengenai Reaksi Darurat

Dalam konteks operasional perusahaan, komunikasi sangatlah penting. Akan berdampak buruk jika terjadi gangguan komunikasi, dan perusahaan mungkin harus menghentikan operasinya. Melaporkan keadaan darurat, mengingatkan karyawan akan potensi risiko, memperbarui kebijakan perusahaan, mengoordinasikan upaya, dan tetap berhubungan dengan klien yang telah atau akan berkolaborasi merupakan fungsi komunikasi.

Pada penelitian ini seminar internal tentang K3 menjadi metode komunikasi perusahaan dengan karyawan. Terkait upaya perusahaan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan selama berada di properti perusahaan, pimpinan memberikan arahan dan bimbingan dalam seminar tersebut.

Dalam keadaan darurat, perintah dikirim sesuai dengan tanggung jawab utama dan peran personel darurat. Berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung yang dibangun untuk keadaan darurat diperlukan untuk komunikasi darurat yang efektif.

Berdasarkan penelitian lapangan, upaya komunikasi pimpinan pekerja-perusahaan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terjadi akibat sifat metode komunikasi yang ada saat ini yang bersifat satu arah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi karyawan yang tidak dapat diatasi. Karyawan harus memenuhi tujuan kinerja mereka untuk sementara. Masih banyak pekerja yang kurang memikirkan keselamatan kerja.

Penilaian tambahan masih diperlukan untuk prosedur insentif dan hukuman yang diterapkan perusahaan. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan prestasi yang dicapai. tujuan yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari proses analisis operasional berbasis K3 yang dilakukan oleh bisnis. Oleh karena itu, pegawai yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memenuhi proses K3 dengan baik dan benar niscaya akan mendapat imbalan.

Karena proses komunikasi yang bersifat satu arah, banyak pegawai yang mengabaikan proses K3 dalam upaya

pemenuhan target kinerjanya. Komunikasi yang dibangun tidak harus menunggu sampai terjadi keadaan darurat, namun proses komunikasi tetap harus dibangun pada saat perencanaan perusahaan dilakukan. Tidak perlu menunggu keadaan darurat untuk mulai membangun komunikasi; proses ini harus dimulai segera setelah perencanaan bisnis selesai. agar semua prosedur diselesaikan dengan cara yang memenuhi harapan.

Protokol komunikasi adalah cara untuk memberi saran kepada anggota staf tentang suatu program sebelum suatu peristiwa terjadi dan untuk memberi tahu mereka bahwa program tersebut telah diaktifkan dan tersedia setelah kejadian tersebut terjadi.

D. Pemeriksaan Teknik Penyelamatan Jiwa Terkait Reaksi Darurat

Fasilitas penyelamat jiwa memiliki dua tujuan, yaitu menjaga infrastruktur dan peralatan perusahaan serta catatan penting untuk melanjutkan operasi setelah keadaan darurat.

Berdasarkan penelitian, perusahaan memiliki kotak pertolongan pertama, alat pemadam kebakaran mobil, pompa hidran, APAT, APD, APAR, tempat berkumpul, jalur evakuasi, dan peralatan penyelamatan lainnya. Rumah sakit mempunyai kebijakan untuk melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas penyelamatan jiwa, dan tim audit internal dan eksternal melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas tersebut. Di sisi lain, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pegangan tangga darurat dan kemiringannya berpotensi menjatuhkan pekerja, penghalang seperti benda yang menghalangi rambu jalur evakuasi dan kotak pertolongan pertama menyulitkan pekerja untuk mengaksesnya. Hal ini disebabkan oleh seringnya inspeksi yang dilakukan perusahaan, yang hanya dilakukan sebulan sekali, dan fakta bahwa karyawan bekerja delapan jam sehari, termasuk satu jam untuk istirahat. Oleh karena itu, pemeriksaan lapangan oleh ahli K3 terhadap kondisi lapangan harus dilakukan secara berkala, idealnya setiap dua hari dalam seminggu.

Waktu yang dialokasikan untuk tanggap darurat dimulai dari pengiriman pasukan, waktu yang diperlukan untuk sampai ke sana, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk memadamkan api. Penyediaan layanan penyelamatan jiwa, darurat medis, dan pencegahan kebakaran oleh tim pemadam kebakaran merupakan salah satu faktor yang mendukung waktu tanggap darurat.

E. Pemeriksaan Struktur Organisasi Tanggap Darurat

Struktur organisasi merupakan bentuk standar dan konsistensi bisnis dalam menangani kejadian, sedangkan manajemen bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi utama organisasi. Organisasi ini menetapkan protokol antara lain pengumpulan informasi, pembagian, dan manajemen insiden.

Menurut penelitian ini, terdapat struktur organisasi di dunia usaha yang berhubungan dengan tanggap darurat bencana. Selain struktur organisasi tersebut, usaha tersebut juga memiliki struktur P2K3 yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.

Ukuran, kompleksitas, dan risiko yang ada di tempat kerja semuanya berperan dalam pembentukan struktur organisasi yang dibangun dari atas ke bawah. Salah satu jenis organisasi satu komando adalah organisasi tanggap darurat bencana. Garis komando dan tanggung jawab harus didefinisikan dengan jelas dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi perusahaan saat ini telah terpenuhi berdasarkan penelitian lapangan, meskipun sejumlah divisi bisnis tetap beroperasi di luar struktur manajemen struktur tanggap darurat. Satu-satunya kategori bencana yang diakui oleh perusahaan adalah kebakaran; namun, unit-unit perusahaan juga diperlengkapi untuk merespons bencana banjir. Sebab, perusahaan tersebut berhenti beroperasi pada tahun 2012.

Potensi bahaya terhadap kelancaran operasional organisasi antara lain banjir, serangan siber, pemadaman TI, kekurangnya ketersediaan bahan baku, dan keluarnya karyawan yang memenuhi syarat. Ancaman berpotensi menimbulkan gangguan atau bahkan kegagalan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk memberikan respons yang lebih efisien dan pemulihan yang lebih cepat dari suatu bencana, perencanaan dan pengorganisasian harus dilakukan secara konstan.

Organisasi memerlukan standar tentang cara kerja yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di suatu daerah, berdasarkan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi pedoman pembentukan dan penyusunannya. Seorang pimpinan, unsur pengarah, dan unsur pelaksana membentuk manajemen.

F. Analisis Kontinuitas Usaha

⊕ Bisnis

Menjaga kelangsungan perusahaan dan sumber dayanya adalah tujuan dari pemulihan atau restart bisnis. Perencanaan kelangsungan bisnis mengidentifikasi tindakan penting yang harus dilakukan jika perusahaan terkena dampak dan mencakup rencana pengembangan pemulihan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa karyawan dan manajemen sama-sama mengetahui prosedur kelangsungan bisnis. Bagi mereka, kesinambungan bisnis mengacu pada pengoperasian yang berkelanjutan untuk mengurangi kecelakaan.

Dengan memastikan tempat kerja tetap dalam kondisi baik, kelangsungan bisnis juga dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi karyawan dan tamu. Selain itu, menjaga komunikasi sangat penting untuk kelangsungan bisnis guna mencegah kesalahan besar, mencegah gangguan pada perusahaan, dan memastikan operasi tetap berjalan seperti biasa. Manajemen organisasi telah berjanji untuk memastikan bahwa tidak ada kemungkinan cedera atau bahaya. Mengingat dedikasi manajemen, sangat penting untuk melakukan tahap penilaian risiko dan menjaga lingkungan di mana klien merasa nyaman dan puas dengan layanan yang mereka terima.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, diperoleh hasil dari upaya perusahaan

dalam menjalankan keberlangsungan bisnis saat ini. Manajemen perusahaan mengizinkan pekerja untuk tetap bekerja dengan menggunakan peraturan protokol kesehatan, pengaturan jam kerja bagi pekerja, dan pemberian vitamin kepada pekerja. Proses kelangsungan bisnis diterapkan pada model gunung es.

Proses gunung es adalah cara berpikir tentang suatu sistem yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok menghadapi pola perilaku, struktur pendukung, dan kondisi mental selama peristiwa tertentu. Informasi yang diperoleh dari kondisi lapangan menunjukkan bahwa usaha tersebut masih dalam tahap induksi dan tidak diberikan kepada pekerja setiap hari.

KESIMPULAN

Meskipun organisasi telah melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelatihan kepada karyawannya, namun beberapa karyawan belum sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam lingkungan kerja mereka, dan manajemen harus terus mengawasi simulasi yang dilakukan. Merupakan ide bagus bagi organisasi untuk menerapkan dan mempertahankan peraturan yang ada dengan tujuan membuat kondisi kerja lebih aman dan nyaman bagi karyawan. Karena satu-satunya cara perusahaan mengkomunikasikan tentang K3 adalah melalui sosialisasi dan penggunaan poster di area produksi, maka komunikasi mengenai program tersebut masih belum ada. Meskipun peralatan penyelamat jiwa perusahaan mematuhi protokol, beberapa gadget masih memerlukan perawatan. Meskipun P2K3 dan organisasi tanggap darurat sudah menjadi struktur organisasi, namun tidak semua unit memiliki struktur tanggap darurat yang efektif. Penyelenggaraan program Kelangsungan Usaha bagi pegawai dilandasi oleh dedikasi manajemen dalam menjaga nama baik perusahaan dan dipahami sebagai memberikan kesinambungan kerja agar pegawai dapat terus berkarya.

SARAN

Beberapa ide tentang bagaimana manajemen dapat menunjukkan kepedulian mereka terhadap karyawannya termasuk memeriksa kondisi lapangan dan berpartisipasi dalam latihan simulasi khusus pekerja. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa aman dan sejahtera pada diri karyawan. Selain itu, personel dapat melaksanakan pembicaraan keselamatan setiap hari. Selain itu, dunia usaha dapat melakukan aktivitas pada Jumat Sehat untuk meningkatkan kesehatan karyawan dan kesiapsiagaan darurat sekaligus membangun kelangsungan bisnis.

Karyawan harus dapat mengikuti kebijakan perusahaan dan, jika terdapat kondisi yang tidak sesuai, mereka harus dapat mengkomunikasikan atau memberi tahu pihak terkait tentang kondisi kerja mereka.

Akademisi masa depan harus mempertimbangkan untuk menggunakan gagasan gunung es, yang digunakan untuk menganalisis dampak kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan dan bisnis dalam skala kecil, menengah, dan besar, untuk menyelidiki keberadaan kelangsungan bisnis di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistyani, Endah. Magang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pura Barutama Kudus. Hiperkes Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 2011. Surakarta
- Dianu, R. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Tri Bakti Sarimas Kabupaten Kuansing. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000. Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jakarta; 2000.
- Chandra, Keefe Darius. Penerapan Business Continuity Pada Bank Central Asia. Volume 21 Nomor 1, 2017. Bandung FEMA 141. 1993. Emergency Management Guide for Business and Industry. A Step by Step Approach to Emergency Planning, Response and Recovery for Companies of All Sizes
- NFPA 1600 Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. ISBN: 978-145590648-2. 2013
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
- ISO 22301 Tahun 2012 tentang Solusi Keberlangsungan Bisnis
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- The Iceberg Model by M. Goodman, 2002. Hopkinton, MA: Innovation Associates Organizational Learning.
- Oktarina, Rienna, and Wenny Gustamola. Pemetaan Sistem Konfigurasi Jaringan Komunikasi Dan Informasi Tanggap Darurat Bencana Di Indonesia. 2010.